KARAKTERISTIK BERACARA DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Nama Mahasiswa : Rafi Wahyu Putra

Email: Rafiwahyuputraa@gmail.com

No BP: 2010003600200

UNIVERSITAS EKA SAKTI

A. PENDAHULUAN

Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara. Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 6 UU Peradilan Tata Usaha Negara, pada pokoknya mengatur bahwa kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara tertinggi (Sjachran, 2010).

Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di ibu kota Kabupaten/Kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota. Sedangkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di ibu kota Provinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi (Supandi, 2011).

Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama maupun tingkat banding mengadili sengketa Tata Usaha Negara. Menurut Pasal 1 angka 10 UU Peradilan Tata Usaha Negara, sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara baik ditingkat pusat maupun daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Harahap, 2002).

Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara adalah hukum yang mengatur tentang cara menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara baik ditingkat pusat maupun daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Indroharto, 1999).

B. PEMBAHASAN

Hukum tata usaha negara atau hukum administrasi negara adalah keseluruhan aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan (negara); atau secara singkat dapat disebut dengan hukum pemerintahan (negara). Penyelenggaraan urusan pemerintahan (negara) adalah pemerintahan yang menurut pasal 1 ayat (2) dilaksanakan oleh organ pemerintahan.

Pengertian hukum tata usaha negara mencakup peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pemerintahan. Menurut Van Wijck/Konijnenbelt, hukum tata usaha negara meliputi keseluruhan instrumentarium juridis yang digunakan/diterapkan oleh pemerintah/penguasa di dalam kepeduliannya mengurus kehidupan masyarakat dan negara beserta jaminan-jaminan perlindungan hukum bagi warga masyarakat. Dalam hukum tata usaha negara juga dikenal pembagian antara hukum material dan hukum formal.

Norma hukum tata usaha negara dalam arti formal adalah merupakan bidang hukum mengenai persoalan kompetensi juga persoalan-persoalan yang harus dipecahkan terlebih dahulu oleh para hakim tata usaha negara sebelum mereka melakukan penilaian mengenai sah tidaknya keputusan tata usaha negara yang disengketakan atau dalam pengertian hukum acara atau prosedur atau yang dikenal dengan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha negara.

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan lingkungan peradilan yang terakhir dibentuk, yang ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 pada tanggal 29 Desember 1986, adapun tujuan dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah untuk mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram serta tertib yang dapat menjamin kedudukan warga masyarakat dalam hukum dan menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang, serta selaras antara aparatur di bidang tata usaha negara dengan para warga masyarakat. Dengan terbentuknya Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) menjadi bukti bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kepastian hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1991 pada tanggal 14 Januari 1991, Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) resmi beroperasi, salah satunya adalah PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA yang berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, dengan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota.

S.F Marbun (1997 : 27) secara filosofis tujuan pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak perseorangan dan hak-hak masyarakat, sehingga tercapai keserasian, keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan masyarakat atau kepentingan umum. Selain itu, menurut Prajudi Atmosudirdjo (1977 : 69), tujuan dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah untuk mengembangkan dan memelihara administrasi negara yang tepat menurut hukum (*rechtmatig*) atau tepat menurut undang-undang (*wetmatig*) atau tepat secara fungsional (*efektif*) atau berfungsi secara efisien. Sedangkan Sjachran Basah (1985 : 25) secara gamblang mengemukakan bahwa tujuan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) ialah memberikan pengayoman hukum dan kepastian hukum, tidak hanya untuk rakyat semata-mata melainkan juga

bagi administrasi negara dalam arti menjaga dan memelihara keseimbangan kepentingan masyarakat dengan kepentingan individu. Untuk administrasi negara akan terjaga ketertiban, ketentraman dan keamanan dalam melaksanakan tugas-tugasnya demi terwujudnya pemerintahan yang kuat bersih dan berwibawa dalam negara hukum berdasarkan Pancasila. Dengan demikian lembaga Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah sebagai salah satu badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, merupakan kekuasaan yang merdeka yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam rangka menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Penegakan hukum dan keadilan ini merupakan bagian dari perlindungan hukum bagi rakyat atas perbuatan hukum publik oleh pejabat administrasi negara yang melanggar hukum. Berdasarkan hal tersebut, maka Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) diadakan dalam rangka memberikan perlindungan (berdasarkan keadilan, kebenaran dan ketertiban dan kepastian hukum) kepada rakyat pencari keadilan (justiciabelen) yang merasa dirinya dirugikan akibat suatu perbuatan hukum publik oleh pejabat administrasi negara, melalui pemeriksaan, pemutusan dan penyelesaian sengketa dalam bidang administrasi negara. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa meskipun segala bentuk tindakan pejabat administrasi negara telah diatur dalam norma-norma hukum administrasi negara akan tetapi bila tidak ada lembaga penegak hukum dari hukum administrasi negara itu sendiri, maka norma-norma tersebut tidak mempunyai arti apa-apa.

Asas Peradilan Tata Usaha Negara :

1. Asas praduga *rechtmatic*, setiap tindakan pemerintahan selalu dianggap *rechtmatic* sampai ada pembatalan (lihat Pasal 67 ayat (1) dan ayat (4) huruf a UUPTUN).
2. Asas para pihak harus didengar.
3. Asas kesatuan beracara.

Peradilan Tata Usaha Negara sebagai pembeda dengan peradilan lainnya, khususnya Peradilan Umum (Perdata), sebagai berikut:

- a. Adanya tenggang waktu mengajukan gugatan (Pasal 55)
- b. Terbatasnya tuntutan yang dapat diajukan dalam Pelitum gugatan penggugat (Pasal 53)
- c. Adanya proses dismissal (rapat permusyawaratan) oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) (Pasal 62).
- d. Dilakukannya pemeriksaan persiapan sebelum diperiksa di persidangan yang terbuka untuk umum (Pasal 63)
- e. Peranan hakim TUN yang aktif (*dominus litis*) untuk mencari kebenaran materiil (Pasal 63,80,85,95, dan 103)
- f. Kedudukan yang tidak seimbang antara penggugat dan tergugat, oleh karenanya “kompensasi” perlu diberikan karena kedudukan penggugat diasumsikan dalam posisi yang lebih lemah dibandingkan dengan tergugat selaku pemegang kekuasaan publik.
- g. Sistem pembuktian yang mengarah pada pembuktian bebas yang terbatas (Pasal 107).
- h. Gugatan di pengadilan tidak mutlak menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (Pasal 67).
- i. Putusan hakim yang tidak boleh bersifat *ultra petita* yaitu melebihi apa yang dituntut dalam gugatan penggugat, akan tetapi dimungkinkan adanya *reformatio in peius* (membawa penggugat pada keadaan yang lebih buruk) sepanjang diatur dalam perundang-undangan.
- j. Putusan hakim TUN yang bersifat *erga omnes*, artinya putusan tersebut tidak hanya berlaku bagi para pihak yang bersengketa, akan tetapi berlaku juga bagi pihak-pihak lainnya yang terkait.

k. Berlakunya asas audit alteram partem, yaitu para pihak yang terlibat dalam sengketa harus didengar penjelasannya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Ciri utama Hukum Acara Peradilan TUN di Indonesia hukum acaranya secara bersama-sama diatur dengan hukum materialnya yaitu dalam UU Nomor 5 Tahun 1985 jo UU Nomor 9 Tahun 2004, jo UU Nomor 51 Tahun 2009 (UU Peradilan TUN). Selain ciri utama tersebut di atas, ada beberapa ciri khusus yang menjadi karakteristik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha

1. Negara yaitu antara lain sebagai berikut; Hakim berperan lebih aktif dalam proses persidangan, guna mencari kebenaran materiil. Keaktifan hakim dapat ditemukan antara lain dalam ketentuan Pasal 63 ayat (2) butir a dan b, Pasal 80, Pasal 85, Pasal 103 ayat (1), Pasal 107.

2. Sistem pembuktian mengarah kepada pembuktian bebas (*vrijbewijs*) yang terbatas (Indroharto, 1996:189). Menurut Pasal 107 hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, beserta penilaian pembuktian, tetapi Pasal 100 menentukan secara limitatif mengenai alat-alat bukti yang digunakan.

3. Gugatan di Pengadilan TUN tidak bersifat menunda Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (*vide* Pasal 67). Hal ini terkait dengan dianutnya asas *Presumptio Justae Causa* dalam Hukum Administrasi Negara, yang berarti adalah bahwa suatu Keputusan TUN harus selalu dianggap benar dan dapat dilaksanakan, sepanjang belum ada Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan sebaliknya. Namun demikian apabila terdapat kepentingan Penggugat yang cukup mendesak, atas permohonan Penggugat, Ketua Pengadilan atau Majelis Hakim dapat memberikan penetapan sela tentang penundaan pelaksanaan keputusan TUN yang disengketakan.

4. Terhadap Putusan Hakim Pengadilan TUN berlaku asas erga omnes, artinya bahwa putusan itu tidak hanya berlaku bagi para pihak yang bersengketa tetapi juga berlaku bagi pihak-pihak lain yang terkait.
5. Dalam proses pemeriksaan di persidangan berlaku asas audi alteram partem yaitu para pihak yang terlibat dalam sengketa harus diberi kesempatan yang sama untuk didengarkan penjelasannya sebelum Hakim memberikan putusan.
6. Dimungkinkan adanya peradilan in absentia (tanpa kehadiran Tergugat) sebagaimana diatur dalam pasal 72 ayat (2).

C. PENUTUP

Hukum tata usaha negara meliputi keseluruhan instrumentarium juridis yang digunakan/diterapkan oleh pemerintah/penguasa di dalam kepeduliannya mengurus kehidupan masyarakat dan negara beserta jaminan-jaminan perlindungan hukum bagi warga masyarakat.

Norma hukum tata usaha negara dalam arti formal adalah merupakan bidang hukum mengenai persoalan kompetensi juga persoalan-persoalan yang harus dipecahkan terlebih dahulu oleh para hakim tata usaha negara sebelum mereka melakukan penilaian mengenai sah tidaknya keputusan tata usaha negara yang disengketakan atau dalam pengertian hukum acara atau prosedur atau yang dikenal dengan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha negara.

Tujuan pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak perseorangan dan hak-hak masyarakat, sehingga tercapai keserasian, keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan masyarakat atau kepentingan umum.

Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah sebagai salah satu badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, merupakan kekuasaan yang merdeka yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam rangka menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Penegakan hukum dan keadilan ini merupakan bagian dari perlindungan hukum bagi rakyat atas perbuatan hukum publik oleh pejabat administrasi negara yang melanggar hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmini Roza dan Laurensius Arliman S, Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia, Masalah-Masalah Hukum, Volume 47, Nomor 1, 2018, <https://doi.org/10.14710/mmh.47.1.2018.10-21>
- Laurensius Arliman S, Peranan Metodologi Penelitian Hukum di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia, Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 1, 201, <http://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3346>.
- Laurensius Arliman S, Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa, Padjadjaran Journal of Law, Volume 4, Nomor 3, 2017, <https://doi.org/10.15408/jch.v4i2.3433>.
- Laurensius Arliman S, Penanaman Modal Asing Di Sumatera Barat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Supremasi Hukum, Volume 1, Nomor 1, 2018, <http://dx.doi.org/10.36441/hukum.v1i01.102>.
- Laurensius Arliman S, Memperkuat Kearifan Lokal Untuk Menangkal Intoleransi Umat Beragama Di Indonesia, Ensiklopedia of Journal, Volume 1, Nomor 1, 2018, <https://doi.org/10.33559/eoj.v1i1.18>.
- Laurensius Arliman S, Perkawinan Antar Negara Di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional, Kertha Patrika, Volume 39, Nomor 3, 2017, <https://doi.org/10.24843/KP.2017.v39.i03.p03>.
- Laurensius Arliman S, Partisipasi Masyarakat Di Dalam Pengelolaan Uang Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Jurnal Arena Hukum, Volume 12, Nomor 2, 2019, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2019.01202.5>.
- Laurensius Arliman S, Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia, Dialogica Jurnalica, Volume 11, Nomor 1, 2019, <https://doi.org/10.28932/di.v1i1.1831>.
- Laurensius Arliman S, Mediasi Melalui Pendekatan Mufakat Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional, UIR Law Review, Volume 2, Nomor 2, 2018, [https://doi.org/10.25299/uirrev.2018.vol2\(02\).1587](https://doi.org/10.25299/uirrev.2018.vol2(02).1587)
- Laurensius Arliman S, Peranan Filsafat Hukum Dalam Perlindungan Hak Anak Yang Berkelanjutan Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia, Doctrinal, Volume 1, Nomor 2, 2016.

- Laurensius Arliman S, Ni Putu Eka Dewi, *Protection of Children and Women's Rights in Indonesiathrough International Regulation Ratification*, Journal of Innovation, Creativity and Change Volume 15, Nomor 6, 2021.
- Laurensius Arliman S, *Gagalnya Perlindungan Anak Sebagai Salah Satu Bagian Dari Hak Asasi Manusia Oleh Orang Tua Ditinjau Dari Mazhab Utilitarianisme*, Jurnal Yuridis, Volume 3, Nomor 2, 2016, <http://dx.doi.org/10.35586/.v3i2.180>.
- Laurensius Arliman S, Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan Pada Revolusi 4.0, Jurnal Ensiklopedia Sosial Review, Volume 2, Nomor 3, 2020..